



Berdasarkan gambar 1.1, jumlah terbanyak masyarakat adat adalah di Kabupaten Bandung, sebanyak 13 Kampung Adat, disusul oleh Kabupaten Cianjur sebanyak 5 kampung Adat dan Kabupaten Indramayu sebanyak 5 kampung Adat. Beberapa masyarakat adat yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, tentunya memiliki karakteristik kewilayahan, nilai-nilai kepercayaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang berbeda-beda. Faktor-faktor identitas budaya seperti bahasa, spiritualitas, kesehatan, bela diri, nilai-nilai leluhur, sikap dan perilaku yang membedakan satu kelompok sosial dari yang lain, memiliki karakteristik yang khas Verulitasari, E., & Cahyono, A. (2016, hlm. 41); Christian, S. A. (2017, hlm. 11); Santoso, I (2006, hlm. 44); Utami S (2018, hlm. 36). Sistem nilai dan pengetahuan, termasuk pengobatan tradisional, permainan tradisional, sekolah dan pengetahuan tradisional dapat dikatakan sebagai inovasi. Wilayah adat meliputi tanah, hutan, laut, dan sumber daya alam (SDA) lainnya, tidak hanya dianggap sebagai barang produktif (ekonomi), tetapi juga mencakup sistem keagamaan, sosial budaya dan hukum adat. Lembaga tersebut yang mengatur diri mereka sendiri sebagai kelompok sosial, budaya, ekonomi dan politik, aturan dan kontrol hidup berdampingan.

Pada dasarnya, semua komunitas, termasuk komunitas tradisional, memiliki proses untuk menjadi "cerdas dan berpengetahuan". Hal ini agar anggota masyarakat adat dapat berpikir secara spontan tentang cara melakukan dan/atau membuat sesuatu, seperti cara membuat makanan, cara membuat alat yang digunakan untuk mengolah makanan, dan lainnya, terkait dengan keinginan untuk dapat menopang dan mempertahankan hidup. Dalam prosesnya, penemuan yang sangat berharga bisa saja terjadi secara tidak sengaja. Bagi masyarakat adat, suatu penemuan dapat memberikan makna dan hakikat hidup, sebagai contoh menemukan tanaman tertentu dapat menghasilkan buah yang dapat dimakan setelah melalui metode pengolahan tertentu; atau sebagian daunnya dapat menyembuhkan sakit perut, sedangkan sebagian lainnya menyembuhkan demam; atau beberapa akar dapat menyembuhkan luka. Mereka mengumpulkan semua informasi, menyimpannya dan meneruskannya dari generasi ke generasi.

Seiring dengan kemajuan sosial ekonomi, prosedur atau teknik yang masyarakat gunakan dalam berbagai penemuan tersebut telah berkembang dan telah mengikuti zaman serta tantangan perubahan sosial. Praktik sosiokultural dan warisan pengetahuan lokal menjadi sumber daya yang tak ternilai untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan beragam. Gaya hidup sehat dengan slogan “*back to nature*” telah menjadi trend baru masyarakat dunia salah satunya dalam penggunaan obat tradisional (herbal). Berdasarkan data WHO, diperkirakan 88% dari seluruh negara menggunakan pengobatan tradisional, seperti obat herbal, akupuntur, yoga, terapi indigenous dan lain-lain. (WHO, 2022). Obat tradisional (herbal) menjadi sumber daya integral untuk kesehatan selama berabad-abad di komunitas di seluruh dunia, dan masih menjadi andalan bagi masyarakat hingga saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat secara perlahan-lahan menciptakan “metode” untuk memperoleh pengetahuan sebagai teknologi asli dengan menggunakan sumber daya alam untuk bertahan hidup.

Penggunaan pengetahuan asli masyarakat lokal dapat disebut sebagai *indigeneous knowledge* atau disingkat IK, yang mencakup berbagai topik permasalahan seperti kesehatan, pangan, pengolahan makanan, peternakan, pengelolaan air minum, konservasi tanah, pengendalian hama dan lain sebagainya. IK biasanya dalam bentuk lisan (*word of mouth*), berkembang di pedesaan bahkan di pelosok, dan sering disebut masih tradisional, tidak terlalu mengandalkan suatu metode, sistematis, bahkan kurang ilmiah. IK tidak pernah dapat dipahami dan disimpan secara sistematis, sehingga akibat terburuknya adalah IK tersebut akan hilang atau tidak lestari. IK seperti aset berharga yang tidak terlihat oleh civitas akademika karena tidak dapat dikomunikasikan secara sistematis, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Akibatnya, sistem ini sering disebut sebagai bentuk kecerdasan masyarakat yang dianggap kurang memadai untuk memenuhi tuntutan produktivitas di dunia modern.

Warren (1987) dalam World Bank (1998, hlm. 5) mendefinisikan kearifan lokal sebagai *indigeneous knowledge* yang unik untuk budaya atau masyarakat tertentu. Menurut Rajasekaran (1993) dalam World Bank (1998, hlm 5) *indigeneous knowledge* adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh oleh

masyarakat lokal melalui akumulasi pengalaman, eksperimen informal dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan dalam budaya tertentu. Haverkort dan de Zeeuw (1992) dalam World Bank (1998, hlm 5), *indigeneous knowledge* adalah pengetahuan yang sebenarnya dari populasi tertentu yang mencerminkan pengalaman berdasarkan tradisi dan mencakup pengalaman yang lebih baru dengan teknologi modern.

*Indigeneous knowledge* dinilai sangat berharga dan memiliki manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat adat, setidaknya bagi mereka yang memilikinya. Sistem dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk hidup, memelihara dan mengejar kehidupan yang sesuai dengan keadaan, kondisi, kemampuan dan nilai-nilai pengalaman dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Dengan kata lain, *indigeneous knowledge* kemudian menjadi bagian dari cara hidup masyarakat adat yang bijaksana, untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidup yang mereka hadapi. Berkat *indigeneous knowledge*, masyarakat adat dapat melanjutkan hidupnya, bahkan berkembang secara berkelanjutan (*sustainable development*), setidaknya hingga semua bentuk sistem modern menggantikan peran *indigeneous knowledge*.

Salah satu bentuk *indigeneous knowledge* yaitu pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat dalam bentuk bertani dan mengolah hasil taninya menjadi makanan pokok. Masyarakat adat di Provinsi Jawa Barat pada dasarnya memiliki cara-cara tersendiri dalam menjaga ketahanan pangannya. Secara garis besar mereka memiliki aturan untuk mempertahankan ketersediaan pangan, sehingga setiap kelompok keluarga berpartisipasi dalam kegiatan bercocok tanam, panen dan menyimpan padinya yang disebut dengan *leuit*. Selain itu, masyarakat adat biasanya memiliki hutan larangan yang tetap dijaga kelestariannya, tanpa membuka lahan garapan ataupun eksploitasi yang berlebihan, sehingga ketersediaan air dan kebutuhan hutan tetap terjaga ekosistemnya. Kebiasaan itupun didukung dengan keyakinan yang mereka anut, yaitu *sunda wiwitan* sebagai kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur (*animisme* dan *dinamisme*) yang dianut masyarakat adat *sunda* tradisional. Penganut ajaran *sunda wiwitan* ini dapat dijumpai pula di beberapa Desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat seperti Kanekes,

Lebak, Banten, Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Ciselok, Sukabumi, Kampung Naga, Cirebon, Cigugur, Kuningan. Kepercayaan Sunda Wiwitan menurut mereka sudah dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam, walaupun tidak semua masyarakat adat menganut kepercayaan sunda wiwitan, adapula masyarakat adat yang menganut agama Islam, seperti masyarakat Adat Cikondang, masyarakat Adat Kampung Dukuh. Perilaku ini dilakukan secara turun temurun, sebagai perintah dari leluhur mereka yang harus dipertahankan. Jika melihat dari aspek unsur masyarakat adat seperti yang dijelaskan sebelumnya, hal ini relevan dengan pendapat Sanders (1999, hlm. 6) menegaskan unsur yang ada di masyarakat adat yaitu: a) Pendudukan tanah leluhur, atau setidaknya sebagian darinya; b) Nenek moyang yang sama dengan penghuni asli masyarakat tersebut; c) Budaya secara umum, atau dalam manifestasi khusus (seperti agama, hidup di bawah sistem kesukuan, keanggotaan komunitas adat, pakaian, mata pencaharian, gaya hidup, dll.); d) Bahasa (apakah digunakan sebagai satu-satunya bahasa, sebagai bahasa ibu, sebagai alat komunikasi yang biasa digunakan di rumah atau dalam keluarga, atau sebagai bahasa utama, pilihan, kebiasaan umum atau bahasa normal); e) Tempat tinggal di bagian tertentu atau wilayah tertentu.

Ketahanan pangan yang dibangun oleh masyarakat adat merupakan produk pengetahuan lokal (*Indigenous Knowledge*), sebagai pesan berharga yang secara turun menurun diwariskan oleh leluhur. Ketahanan pangan menurut Rivera & Qamar, (2003, hlm. 31) menjelaskan bahwa:

Ketahanan pangan sering didefinisikan dalam hal ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan (*Food availability*) tercapai ketika jumlah pangan yang cukup tersedia secara konsisten untuk semua individu. Pangan tersebut dapat dipasok melalui produksi rumah tangga, keluaran domestik lainnya, impor komersial atau bantuan pangan. Akses pangan (*Food access*) dipastikan ketika rumah tangga dan semua individu di dalamnya memiliki sumber daya yang memadai untuk mendapatkan makanan yang sesuai untuk diet gizi.

Berdasarkan definisi tersebut, maka ketahanan pangan yang dilakukan oleh masyarakat adat merupakan bentuk pengetahuan lokal yang sangat berharga dalam menjaga konsistensi ketersediaan pangan secara lokal, dan dapat menjadi prototipe yang dilakukan secara Nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama.

Muhammad Irfan Hilmi, 2023

**TRANSFORMASI PENGETAHUAN LOKAL DALAM MEMBENTUK PERILAKU PEMENUHAN KETAHANAN PANGAN (Studi Etnografi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pengalaman telah membuktikan bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Masalah pangan di tingkat global dan nasional selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan karena pemenuhan kebutuhan akan pangan adalah hak setiap warga negara. Negara wajib menjamin kebutuhan pangan bagi warga negara secara kuantitas dan kualitasnya. Amanat undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, memberikan atensi pada Pemerintah Indonesia untuk terus berkomitmen untuk memnuhi dan memperkuat ketahanan pangan bagi 270,2 juta penduduknya. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SGDs*) yaitu menghilangkan kelaparan (*zero hunger*) pada tahun 2030.

Ketahanan pangan, baik di tingkat nasional, regional/daerah, maupun rumah tangga merupakan persoalan besar yang seolah tak kunjung selesai dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan data GFSI mengenai ketahanan pangan, angka prevelansi stunting di Indonesia juga masih dalam kategori sedang/menengah. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Balita Indonesia mencapai 24,4% pada 2021. Artinya, hampir 1 dari 4 Balita mengalami stunting. Dengan demikian prevalensi stunting Indonesia termasuk dalam kelompok sedang menurut standar *World Health Organizations* (WHO) (Kusnandar, 2022). Balita yang mengalami masalah gizi atau gizi buruk di usia belia dan menderita stunting dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa depan.

Stunting dan gizi buruk sangat berkaitan dengan kebutuhan akan pemenuhan pangan keluarga. Berdasarkan data GFSI, masalah yang masih lemah dalam ketahanan pangan Indonesia salah satunya pada keragaman makanan pokok yang masih dinilai rendah dan kerentanan akan perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia, bahkan hal ini menentukan eksistensi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ketahanan pangan ini bukan hanya dari aspek biologis tetapi juga aspek sosial.

Muhammad Irfan Hilmi, 2023

**TRANSFORMASI PENGETAHUAN LOKAL DALAM MEMBENTUK PERILAKU PEMENUHAN KETAHANAN PANGAN (Studi Etnografi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kerapuhan pangan dapat menyebabkan masalah sosial seperti keterbelakangan, ketergantungan, tindakan kriminal, konflik sosial. Dalam hal konflik sosial, isu pangan, konfliknya bisa sangat brutal. (Kingsey, 2011).

Masalah terkait ketahanan pangan bisa dilihat dari sudut pandang konstruksi sosial, berbagai realitas pada kehidupan pada dasarnya merupakan hasil sebuah konstruksi sosial. Artinya, suatu realitas itu sebenarnya merupakan hasil dari proses-proses interpretasi dan relasi sosial. Realitas itu di konstruksi secara sosial (Berger and Luckman, 2011; Wallace and Wolf, 2005; dan Hanigan, 2006). Pangan dan ketahanan pangan, juga merupakan sebuah konstruksi sosial. (Hannigan, 2006) melihat lebih tajam “proses-proses sosial, politik, pendidikan dan budaya” yang turut menentukan persoalan pangan dan ketahanan pangan.

Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang kaya akan variasi sosial budaya, termasuk yang potensial dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Dari segi konsumsi, diversifikasi pangan merupakan suatu hal yang penting untuk menciptakan ketahanan pangan. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia beruntung karena banyaknya komunitas atau suku di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki jenis makanan pokok yang bervariasi, bukan beras saja. Sagu menjadi salah satu makanan pokok bagi orang-orang Ambon, jagung menjadi salah satu makanan pokok bagi orang-orang Nusa Tenggara Timur, singkong menjadi salah satu makanan pokok bagi orang Jawa dan umbi-umbian menjadi salah satu makanan pokok orang Papua.

Secara umum, komunitas masyarakat di berbagai daerah di Indonesia memiliki pola konsumsi yang beragam, bukan hanya berkaitan dengan makanan pokok saja, tetapi juga berkaitan dengan “makanan pendamping” juga makanan tambahan”. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi pangan sudah dilaksanakan oleh berbagai suku dan komunitas lokal di Indonesia. Pola konsumsi lokal seperti ini perlu didukung bahkan direplikasi di tingkat nasional untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Perlu diingat bahwa bukan hanya pola konsumsi terkait makanannya saja, namun penanaman dari generasi ke generasi akan konstruksi pola konsumsi yang dilakukan komunitas dan suku budaya perlu untuk ditelaah dan dianalisis untuk menjadi *role model* ketahanan pangan nasional.

Sistem konsumsi dan penyediaan pangan di masyarakat Indonesia sudah memiliki daya tahan yang tinggi. Ketergantungan masyarakat pada pasar sangat rendah. Berbagai kebutuhan akan pangan untuk makanan pokok, pendamping atau tambahan dapat dipenuhi dari hasil pengelolaan lahan sendiri maupun lahan di sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat kita telah melaksanakan sistem produksi dan konsumsi pangan yang lebih bersifat lokal sehingga masyarakat lokal mempunyai ketahanan dan kemandirian pangan yang cukup tinggi. (Kingsey, 2011).

Ketahanan pangan yang dibangun oleh masyarakat adat telah relevan dengan kebijakan pemerintah. Menurut undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kondisi pandemi Covid telah banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk ketahanan pangan setiap Provinsi. Berdasarkan data Susesnas tahun 2019, ketahanan pangan di Masa Covid 19 yang terjadi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang aman dengan kondisi ketahanan pangan masyarakat, termasuk kondisi masyarakat adat telah menyokong data indeks ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat. Walaupun berdomisili di daerah pelosok, namun masyarakat adat mampu bertahan pada kondisi krisis pangan. Peta ketahanan pangan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2.





**Gambar 1.2**  
Data Ketahanan Pangan Indonesia di Masa Covid 19

Komunitas masyarakat lokal juga memiliki kearifan lokal yang menarik dan potensial bagi peningkatan ketahanan pangan. Salah satu masyarakat adat yang menarik untuk dikaji dari aspek ketahanan pangan, yaitu masyarakat adat Cireundeu Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat. Alasan pentingnya adalah masyarakat Adat Cireundeu memiliki pola ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam prosesnya, yaitu tidak hanya berhenti pada proses penyimpanan bahan makanan, melainkan proses pengolahan dan diversifikasi produk bahan baku pangan. Secara sosiologis mereka lebih terbuka terhadap modernisasi, dibandingkan dengan masyarakat adat lainnya yang cenderung tertutup terhadap kehidupan luar. Selain itu, berdasarkan data hasil studi pendahuluan peneliti, di wilayah Kampung Adat Cireundeu tidak terdapat balita yang mengalami stunting dan gizi buruk. Pola konsumsi non beras pada masyarakat Adat Cireundeu ini mampu menjaga kesehatan (balita dan orang dewasa) untuk tetap sehat dengan bahan pangan lokal lainnya. (Adnan, A., & Solihin, S. 2018, hlm. 10; Putranto, K., & Taofik, A. 2014, hlm.159; Halawa, O., Nurhayati, S., & Rochana, S, 2019, hlm. 211).

Masyarakat Adat Cireundeu terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Terdiri dari 42 kepala keluarga atau 159 jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian bertani singkong. Masyarakat Adat Cireundeu memiliki luas

64 ha terdiri dari 60 ha untuk pertanian dan 4 ha untuk pemukiman. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan. Hingga saat ini, masyarakat Adat Cireundeu selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Kelestarian nilai-nilai budaya selalu dipelihara oleh masyarakat adat dengan upaya-upaya pendidikan yang tertanam sejak dini. Proses transformasi nilai-nilai tersebut dibentuk oleh keluarga, lingkungan dan ketokohan yang selalu senantiasa dibangun dalam kesehariannya. Masyarakat adat Cireundeu dalam kesehariannya membaaur dengan masyarakat lain dan terbuka terhadap perubahan zaman atau modernisasi, namun *indigeneous knowledge* yang dimiliki oleh masyarakat tidak memiliki perubahan, mereka tetap mengkonsumsi singkong dan beras singkong (rasi) sebagai bahan makanan pokoknya.

Berdasarkan hasil penelitian, secara ilmiah diketahui kandungan gizi pada 100 gram singkong mengandung energi sebesar 154 kilo kalori, protein 1 gram, karbohidrat 36,8 gram, lemak 0,3 gram, kalsium 77 miligram, fosfor 24 miligram dan zat besi 1,1 miligram. Jumlah kalori pada singkong lebih tinggi daripada kalori pada umbi jenis lain, sehingga mendapatkan energi ekstra untuk menjalani aktivitas sehari-hari jika mengonsumsi singkong. Selain kalori, singkong juga kaya akan karbohidrat kompleks dan serat. Kedua nutrisi ini berfungsi untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, mengurangi peradangan, dan mengendalikan kadar gula darah. Bila kadar gula darah terkendali, risiko terjadinya diabetes tipe 2 dan obesitas juga akan lebih rendah (Bargumono & Wongsowijaya, 2013).

Masyarakat Adat Cireundeu memiliki entitas tersendiri, serta kekayaan yang layak dipelajari dari berbagai sudut pandang, terutama dalam membangun budaya belajar di keluarga dan lingkungannya, yang mengisyaratkan bahwa budaya belajar merupakan "pola bagi kelakuan manusia yang berfungsi sebagai *blueprint* (atau pedoman hidup) yang dianut secara bersama" dalam transformasi budaya. Sebagai sebuah pedoman, budaya belajar digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, yang dapat menciptakan dan

mendorong individu-individu bersangkutan melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan etika, nilai dan norma yang telah ditentukan bersama.

Selain itu, budaya belajar dapat menjadi piranti proses adaptasi manusia dengan lingkungannya, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sistem pengetahuan belajar digunakan untuk adaptasi dalam kerangka untuk memenuhi tiga syarat kebutuhan hidup, yakni: (1) syarat dasar alamiah, yang berupa kebutuhan biologis seperti pemenuhan kebutuhan makan, minum, menjaga stamina, menjadikan lebih berfungsi organ-organ tubuh manusia; (2) syarat kejiwaan yakni pemenuhan kebutuhan akan perasaan tenang, jauh dari perasaan-perasaan takut, keterkucilan, kegelisahan dan berbagai kebutuhan kejiwaan lainnya; (3) syarat dasar sosial, yakni kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, dapat melangsungkan hubungan, dapat mempelajari kebudayaan, dapat mempertahankan diri dari serangan musuh, dan sebagainya (Suparlan, 2014).

Kajian keilmuan pendidikan masyarakat berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan pemenuhan ketahanan pangan dapat dikaji sebagai bagian dari proses pendidikan di masyarakat. Masyarakat sebagai objek pendidikan masyarakat, berpandangan bahwa masyarakat digerakkan melalui edukasi, melalui pemikiran-pemikiran kritis terhadap pengembangan dirinya dan komunitasnya. Masalah pangan dapat dipandang sebagai hasil kontruksi sosial masyarakat. Pada kajian pendidikan masyarakat, konteks perilaku pemenuhan ketahanan pangan dipandang sebagai hasil interaksi edukasi masyarakat Adat. Perilaku pemenuhan ketahanan pangan masyarakat Adat merupakan sebuah realitas hasil interpretasi dan relasi sosial di masyarakat. Perilaku ini merupakan hasil dari proses interaksi edukasi yang terjadi di masyarakat Adat melalui transformasi pengetahuan lokal.

Perilaku pemenuhan ketahanan pangan Masyarakat Adat merupakan hasil dari sebuah interaksi pengalaman yang terjadi pada manusia dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam bentuk manifestasi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Perilaku pemenuhan ketahanan pangan yang dibangun oleh masyarakat adat, merupakan hasil belajar yang terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Nilai-nilai budaya hasil proses interaksi edukasi inilah yang secara turun menurun

tertanam dari generasi satu kepada generasi yang lainnya. Sebagai wujud dari pengetahuan lokal, maka proses belajar ini terjadi secara natural, berlangsung apa adanya dan tidak tertulis atau terlembagakan. Transformasi pengetahuan lokal inilah yang perlu dikaji melalui penelitian, untuk mengetahui proses, tahapan, faktor-faktor dan komponen apa saja yang melatarbelakangi transformasi pengetahuan lokal di masyarakat adat.

Peneliti akan mengkaji konstruksi pengetahuan lokal yang terjadi di masyarakat adat Cireundeu dengan fokus masalah mengenai perilaku pemenuhan ketahanan pangan, sehingga model ini akan berguna bagi masyarakat di luar masyarakat adat. Model transformasi pengetahuan lokal bisa dikembangkan menjadi *role model* muatan program yang dapat diterapkan pada lembaga-lembaga satuan pendidikan masyarakat seperti Sekolah Alam, *Homeschooling*, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sedangkan di masyarakat, dapat diterapkan di level pemerintah Kecamatan, Desa/ Kelurahan, hingga terkecil lingkungan RW dan RT, sehingga menciptakan kewilayahan yang siaga pangan melalui model transformasi pengetahuan lokal dalam membentuk perilaku pemenuhan ketahanan pangan.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dijelaskan bahwa terdapat nilai-nilai positif dan permasalahan yang terjadi di masyarakat adat Cireundeu dalam membentuk perilaku pemenuhan ketahanan pangan, yang meliputi:

1. Masyarakat adat Cireundeu berdomisili di tengah-tengah masyarakat non adat, mereka membaur satu sama lain dan terbuka terhadap modernisasi. Sedangkan nilai-nilai pengetahuan lokal banyak disampaikan secara lisan kepada generasi-generasi penerus, tentu hal ini sangatlah riskan akan hilangnya nilai budaya tersebut, jika tidak dilestarikan dengan baik kepada setiap generasinya. Maka perlu secara tertulis, nilai-nilai pengetahuan lokal ketahanan pangan ini dikaji melalui riset, agar menjadi jejak kajian yang dapat menjadi sumber belajar bagi masyarakat adat itu sendiri maupun masyarakat non adat.

2. Transformasi pengetahuan lokal dalam membentuk perilaku pemenuhan ketahanan pangan merupakan budaya yang terbentuk lama, sehingga menjadi keyakinan yang tertanam di masyarakat adat. Namun, belum diketahui hakikat nilai-nilai pengetahuan lokal yang secara utuh membentuk kepercayaan tersebut, karena akan sangat penting untuk diketahui faktor pendukungnya, seperti ketokohan, lingkungan belajarnya, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan atau aturan yang melekat sehingga mewujudkan *punishment* dan *reward* bagi masyarakat itu sendiri.
3. Belum terdapatnya model transformasi pengetahuan lokal dalam membentuk perilaku pemenuhan ketahanan pangan, sehingga perlu dikaji melalui penelitian agar diperoleh model konstruksi yang dibangun oleh masyarakat adat, agar dapat diterapkan pada komunitas atau masyarakat yang berbeda.
4. Masyarakat Adat Cireundeu merupakan masyarakat yang berkedudukan penting di Kota Cimahi, karena menjadi salah satu destinasi wisata beberapa wisatawan asing dan lokal. Wisata edukasi yang ditampilkan yaitu pengolahan makanan berbahan dasar singkong, pengolahan beras singkong (rasi), alat-alat musik tradisional seperti karinding, dan permainan tradisional. Potensi-potensi tersebut menjadi tampilan yang menarik serta menjadi suguhan yang memiliki nilai ekonomi. Namun, belum terdapat paket wisata yang dapat merasakan pengetahuan lokal di lingkungan keluarga. Dengan demikian, hal tersebut akan menjadi potensi wisata keluarga yang menarik jika wisatawan dapat merasakan secara langsung aktifitas keluarga adat sehari-hari, seperti program seminggu bersama keluarga adat Cireundeu. Para wisatawan dapat memahami benar, proses pengetahuan lokal, perilaku pemenuhan ketahanan pangan dan nilai-nilai budaya lainnya disampaikan di lingkungan keluarga.

### **1.2.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pada banyaknya faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat Adat dan perilaku pemenuhan ketahanan pangan, peneliti membatasinya dalam rumusan masalah penelitian, yaitu *Bagaimana Transformasi Pengetahuan Lokal dalam Membentuk Perilaku Pemenuhan Ketahanan Pangan di*

*Masyarakat Adat Cireundeu Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi?*

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem sosial yang memperkuat pembentukan perilaku pemenuhan ketahanan pangan pada masyarakat Adat Cireundeu?
2. Bagaimana transformasi pengetahuan lokal dalam membentuk perilaku pemenuhan ketahanan pangan pada masyarakat Adat Cireundeu?
3. Bagaimana konstruksi model transformasi pengetahuan lokal dalam membentuk perilaku pemenuhan ketahanan pangan pada masyarakat Adat Cireundeu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, peneliti menyusun beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem sosial yang memperkuat pembentukan perilaku pemenuhan ketahanan pangan pada masyarakat Adat Cireundeu.
2. Menganalisis transformasi pengetahuan lokal dalam membentuk perilaku pemenuhan ketahanan pangan pada Masyarakat Adat Cireundeu.
3. Mengkonstruksi model transformasi pengetahuan lokal dalam membentuk perilaku pemenuhan ketahanan pangan pada Masyarakat Adat Cireundeu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini akan memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara teoretis, hasil dan temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan keilmuan pendidikan masyarakat, khususnya berkaitan dengan transformasi pengetahuan lokal dalam membentuk perilaku pemenuhan ketahanan pangan. Dengan demikian, hal ini akan memperkuat dan memperkaya khazanah keilmuan pendidikan masyarakat dalam upaya pemberdayaan dan pendidikan masyarakat, terutama model yang adaptif dapat digunakan bagi masyarakat non adat.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat diluar masyarakat adat, yaitu dapat menjadi *role model* muatan program pada satuan pendidikan masyarakat yang dikembangkan khas di satuan pendidikan masyarakat, seperti *homescholling*, PKBM dan sekolah alam. Selain itu, dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan, level Kecamatan, Desa/ Kelurahan, dan RW/RT, sebagai kewilayahan yang mampu membangun ketahanan pangan.

### 1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Struktur organisasi disertasi merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2019, hlm. 21) dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi disertasi.

- b. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini membahas kajian pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian antara lain Konsep Pendidikan Masyarakat, Konsep Kebudayaan dalam Masyarakat, Konsep Pengetahuan Lokal, Konsep Masyarakat Adat, Perilaku Pemenuhan Ketahanan Pangan, Konsep *Sustainable Development Goal's* Desa.

- c. Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

- d. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

e. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada bab ini yang dibahas adalah simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.